



PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 10 Desember 2025

Nomor : B/900/1384/BKAD-SET/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Penilaian Kesesuaian
Rancangan KUA PPAS Dengan
KEM PPKF Tahun 2026
Kabupaten/Kota

Yth. Wali Kota/ Bupati (terlampir)
di
Tempat

Sehubungan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan penilaian atas kesesuaian rancangan KUA PPAS Kabupaten/Kota dengan KEM PPKF.

Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan hasil penilaian kesesuaian rancangan KUA PPAS Kabupaten/Kota dengan KEM PPKF TA 2026 (terlampir). Selanjutnya, berdasarkan hasil penilaian kesesuaian ini, pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan atas rancangan KUA PPAS yang sedang dilakukan pembahasan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Namun dalam hal rancangan KUA PPAS telah mendapatkan kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, hasil penilaian tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Selanjutnya, untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD tahun 2026, Pemerintah Kabupaten/Kota perlu memperhatikan program-program daerah yang selaras dengan program prioritas nasional dan mempedomani Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Terkait alokasi TKD Tahun 2026, Pemerintah Daerah dapat mengakses alokasi tersebut pada laman resmi DJPK (www.djpk.kemenkeu.go.id) sebelum

ditetapkan dalam Perpres tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Kepulauan Riau
Penjabat Sekretaris Daerah,



Luki Zaiman Prawira

Tembusan:

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
3. Plt. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Lampiran I Surat Sekretaris Daerah Prov Kepri
Nomor : B/900/1384/BKAD-SET/2025
Tanggal : 10 Desember 2025

DAFTAR LAMPIRAN

1. Wali Kota Batam
2. Bupati Bintan
3. Bupati Karimun
4. Bupati Lingga
5. Wali Kota Tanjungpinang
6. Bupati Kepulauan Anambas
7. Bupati Natuna

a.n. Gubernur Kepulauan Riau
Penjabat Sekretaris Daerah,



Luki Zaiman Prawira

Lampiran II Surat Sekretaris Daerah Prov Kepri
Nomor : B/900/1384/BKAD-SET/2025
Tanggal : 10 Desember 2025

Hasil Evaluasi Penyelarasan KEM-PPKF dan KUA-PPAS 2026 Kota Batam

Pendahuluan

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, Pemerintah Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan Rancangan KUA dan rancangan PPAS dimaksud dilakukan minimal sesuai target kinerja makro Daerah dan target kinerja program Daerah yang telah diselaraskan dengan pemutakhiran KEM PPKF.

Selanjutnya Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD, yang juga disampaikan oleh Bupati/Wali Kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Rancangan KUA dan rancangan PPAS Kabupaten/Kota dilakukan penilaian kesesuaian dengan KEM PPKF oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, hasil penilaian kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan KEM PPKF disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Wali Kota, paling lambat 2 (dua) minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS diterima.

Secara teknis ketentuan tentang tata cara penilaian di atas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berikut adalah ringkasan hasil penilaian kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan KEM PPKF untuk **Kota Batam**, dengan hasil penilaian sebagai berikut:

- A. Target Makro:
 - a. Target Pertumbuhan Ekonomi : SELARAS
 - b. Target Tingkat Kemiskinan : SELARAS
- B. Penyelarasan Narasi KUA
 - a. Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi) : SELARAS
 - b. Kesehatan (Indeks Kesehatan) : SELARAS
 - c. Ketahanan Pangan (Perikanan) : SELARAS
 - d. Ketahanan Pangan (Pertanian) : SELARAS
 - e. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan) : SELARAS
 - f. Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi) : SELARAS

Secara lengkap berikut adalah hasil evaluasi dan analisis atas penilaian kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan KEM PPKF untuk **Kota Batam** sesuai lampiran.

Hasil Evaluasi Penyelarasan KEM-PPKF dan KUA-PPAS 2026

Kode Satker : 990523

Nama Pemda : Kota Batam

Verifikator : Provinsi Kepulauan Riau

A. Target Makro

Uraian	Target	Nilai KUA	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi	7,37-8,01	6,7-7,5	Pemerintah Kota Batam dalam Rancangan KUA PPAS TA.2026 menetapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7-7,5%. Target yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Batam berbeda dengan target pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dan Rancangan Akhir RKPD TA. 2026 yaitu 7,37-8,01%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan belum sepenuhnya mencerminkan keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah Kota Batam perlu melakukan optimalisasi program dan kegiatan strategis yang mendorong peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah, serta memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan utama, agar capaian pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat dan selaras dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.
Tingkat Kemiskinan	4,62-4,52	4,41-4,55	Pemerintah Kota Batam dalam Rancangan Akhir RKPD TA. 2026 dan Rancangan KUA PPAS TA.2026 menetapkan tingkat kemiskinan sebesar 4,55-4,41%. Target ini berada pada kisaran atas rentang target Tingkat Kemiskinan Kota Batam yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 yaitu 4,62-4,52%, sehingga secara umum telah selaras dengan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah Kota Batam agar mengakselerasi program penanggulangan kemiskinan secara terarah dan terukur dengan harapan dapat memperkuat kontribusi Kota Batam dalam pencapaian target penurunan tingkat kemiskinan melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029.

B. Penyelarasaan Narasi KUA

Uraian	Status	Keterangan
Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Selaras	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, Rancangan KUA Tahun Anggaran 2026 Kota Batam telah menunjukkan keselarasan terhadap pemenuhan Indikator Strategi Kewilayahan- Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi) yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF 2026. Untuk mendukung pencapaian program yang telah direncanakan, Pemerintah Kota Batam perlu mengalokasikan anggarannya dalam APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026.
Kesehatan (Indeks Kesehatan)	Selaras	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, Rancangan KUA Tahun Anggaran 2026 Kota Batam telah menunjukkan keselarasan terhadap pemenuhan Indikator Strategi Kewilayahan- Kesehatan (Indeks Kesehatan) yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF 2026. Untuk itu, Pemerintah Kota Batam agar mempertahankan konsistensi tersebut serta memastikan dukungan pendanaan dalam APBD tetap diarahkan untuk meningkatkan capaian Indeks Kesehatan secara berkelanjutan.
Ketahanan Pangan (Perikanan)	Selaras	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, Rancangan KUA Tahun Anggaran 2026 Kota Batam telah menunjukkan keselarasan terhadap pemenuhan Indikator Strategi Kewilayahan- Ketahanan Pangan (Perikanan) yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF 2026. Pemerintah Kota Batam agar dapat melanjutkan langkah penguatan program dan pendanaan guna menjaga keberlanjutan ketahanan pangan berbasis sektor perikanan.
Ketahanan Pangan (Pertanian)	Selaras	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, Rancangan KUA Tahun Anggaran 2026 Kota Batam telah menunjukkan keselarasan terhadap pemenuhan Indikator Strategi Kewilayahan- Ketahanan Pangan (Pertanian) yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF 2026. Pemerintah Kota Batam agar dapat mempertahankan keselarasan tersebut melalui penguatan kebijakan dan pengalokasian anggaran yang mendukung peningkatan kapasitas sektor pertanian dan stabilitas ketahanan pangan daerah.
Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Selaras	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, Rancangan KUA Tahun Anggaran 2026 Kota Batam telah menunjukkan keselarasan terhadap pemenuhan Indikator Strategi Kewilayahan- Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan) yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF 2026. Pemerintah Kota Batam agar dapat mempertahankan keselarasan tersebut melalui optimalisasi kebijakan dan penganggaran yang mendukung penurunan tingkat kemiskinan secara terukur dan berkelanjutan.

Uraian	Status	Keterangan
Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Selaras	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, Rancangan KUA Tahun Anggaran 2026 Kota Batam telah menunjukkan keselarasan terhadap pemenuhan Indikator Strategi Kewilayahan- Pendidikan yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF 2026. Pemerintah Kota Batam agar mempertahankan keselarasan tersebut melalui optimalisasi kebijakan dan penganggaran dalam rangka mendukung peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan di wilayah Kota Batam.

C. Program Prioritas dan Kebijakan Fiskal Nasional

Uraian	Nilai	Keterangan
Belum ada data.		

D. Mandatory Spending

Uraian	Status	Keterangan
Mandatory Spending		
PDRD		

Lampiran 2

Penyelarasaan Narasi KUA

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasaan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	• Penguatan tata kelola investasi seperti deregulasi perizinan, penyederhanaan birokrasi dan peningkatan transparansi pelaksanaan proyek; • Alokasi belanja ekonomi yang mendukung Pengembangan koridor industri semikonduktor, mesin dan perlengkapan, dirgantara, industri transportasi laut dan galangan kapal, hilirisasi bauksit, logam, besi, dan baja, industri berteknologi tinggi, industri hijau, dan industri halal; • Pembangunan infrastruktur konektifitas dalam hal transportasi darat dan perikanan sesuai dengan RPJMN; • Meningkatkan persentase pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.; • Pemberian insentif fiskal PDRD secara selektif untuk sektor unggulan daerah.	none	1. Dalam Penguatan tata kelola investasi seperti deregulasi perizinan, penyederhanaan birokrasi dan peningkatan transparansi pelaksanaan proyek, Pemerintah Kota Batam berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur perizinan, kepastian hukum, perlindungan investasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima (halaman 36), menyusun peta potensi investasi di Kota Batam dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan investasi, menjaga kondusivitas daerah untuk peningkatan investasi 2. Dalam rangka alokasi belanja ekonomi yang mendukung Pengembangan koridor industri semikonduktor, mesin dan perlengkapan, dirgantara, industri transportasi laut dan galangan kapal, hilirisasi bauksit, logam, besi, dan baja, industri berteknologi tinggi, industri hijau, industri halal, dan Pembangunan infrastruktur konektifitas, Pemerintah Kota Batam telah menuangkannya dalam kebijakan belanja antara lain: 1). Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan, melalui: - Pengadaan alat berat, pembangunan rumah pompa di Kecamatan Sungai Beduk, pembangunan drainase di Taman Raya, Simpang Kepri Mall, Duta Plamo, Legenda Malaka, Taman Makam Pahlawan, Perumahan Marina Green, Jalan S.Parman, Baloi Permai dan Puriloka untuk penanganan banjir; - Pengadaan excavator, compactor, armroll truck, dump	Selaras	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, Rancangan KUA Tahun Anggaran 2026 Kota Batam telah menunjukkan keselarasan terhadap pemenuhan Indikator Strategi Kewilayahan- Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi) yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF 2026. Untuk mendukung pencapaian program yang telah direncanakan, Pemerintah Kota Batam perlu mengalokasikan anggarannya dalam APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026.

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
			truck dan bin container untuk penanganan sampah; - Peningkatan pelayanan air bersih hinterland di Pulau Mubut dan Teluk Nipah Kelurahan Galang Baru Kecamatan Galang; - Pembangunan jalan Simpang Princess Tiban ke Kantor Lurah Kibing, jalan akses Tanjung Uma/DC Mall, simpang SMPN 25 Tiban ke Tanjung Uma; - Pembangunan jembatan Bengkong Sadai dan Belian; - Peningkatan jalan di sejumlah titik Kota Batam antara lain Belian-Batam Centre, Cikitsu-SMAN 3, Golden Prawn-Ocarina, Simpang KDA-Simpang BI, Sei Pancur-Kampung Bagan-DAM, Simpang Kara-Orchid Park, Simpang Sekolah Ulil Albab-Tiban 3, Simpang Mukakuning-Tanjung Piayu, Simpang Frangky-Rosedale-Underpass Pelita, Kantor Camat Sagulung-Simpang NATO, Legenda Malaka depan SMPN 12 sampai Simpang Helm; - Pembangunan lampu penerangan jalan umum di Southlink, Marina City, UIB sampai Flyover Laluan Madani; - Pengecatan kanstin di jalan utama dari Simpang Bandara sampai Simpang Flyover Laluan Madani; - Pemasangan traffic light di Simpang Masjid Agung Batam Centre; - Pradesign penataan taman di Kecamatan Sekupang dan Sagulung; dan - Pengadaan mobil tangga pemadam aerial panjang 46 meter.		

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
			2). Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah, melalui: - Peningkatan infrastruktur daerah untuk menarik investasi dan mendukung sektor pariwisata. 3. Untuk pemenuhan earmarking PKB dan Opsen PKB, Pemerintah Kota Batam telah menuangkannya dalam kebijakan belanja melalui antara lain: - pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda transportasi 3. Dalam hal pemberian insentif fiskal PDRD secara selektif untuk sektor unggulan daerah, Pemerintah Kota Batam telah melakukan kebijakan Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah secara transparan dan akuntabel antara lain melalui: 1) digitalisasi layanan pajak dan retribusi, penggunaan tapping box 2) pelayanan mobil pajak keliling 3) meningkatkan pengawasan terhadap potensi penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah 4) memberikan pengurangan PBB-P2 5) membebaskan PBB-P2 bagi NJOP dibawah 120 juta 6) pemberbasan BPHTPB bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (Halaman 39-42)		

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Kesehatan (Indeks Kesehatan)	• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan imunisasi dasar lengkap, persalinan serta penguatan layanan kesehatan; • Meningkatkan persentase earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; • Melakukan skema Sinergi Pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infra layanan kesehatan.	none	Dalam hal Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, Meningkatkan persentase earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan, Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan dan Melakukan skema Sinergi Pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infra layanan kesehatan, Pemerintah Kota Batam telah melakukan Kebijakan dalam rangka Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi melalui antara lain : - Pemenuhan target Universal Health Coverage; - Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; (Halaman 41)	Selaras	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, Rancangan KUA Tahun Anggaran 2026 Kota Batam telah menunjukkan keselarasan terhadap pemenuhan Indikator Strategi Kewilayahan- Kesehatan (Indeks Kesehatan) yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF 2026. Untuk itu, Pemerintah Kota Batam agar mempertahankan konsistensi tersebut serta memastikan dukungan pendanaan dalam APBD tetap diarahkan untuk meningkatkan capaian Indeks Kesehatan secara berkelanjutan.

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Ketahanan Pangan (Perikanan)	• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan;	none	1. Untuk mendukung penguatan fiskal daerah, Pemerintah Kota Batam telah melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah secara transparan dan akuntabel melalui digitalisasi layanan pajak dan retribusi, penggunaan tapping box, pelayanan mobil pajak keliling dan meningkatkan pengawasan terhadap potensi penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah; (halaman 36) 2. Untuk Penguatan kerja sama antar daerah, dilakukan hal-hal antara lain : 1) peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi untuk peningkatan Dana Transfer dan Pendapatan Bagi Hasil melalui penyiapan data pendukung dalam mengalokasikan dana transfer pusat dan bagi hasil provinsi; (halaman 36) 2) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk peningkatan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah; (halaman 36) 3)Menjalin kerja sama antar daerah dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok; dan (Halama 41) 3. Dalam rangka penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan, Pemerintah Kota Batam melakukan kebijakan berupa: 1) Pemberian perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan kepada pengemudi transportasi online, nelayan, petani, pengemudi boat pancung dan para penerima insentif 2) Pendampingan kepada pelaku usaha perikanan dan pertanian (Halaman 41)	Selaras	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, Rancangan KUA Tahun Anggaran 2026 Kota Batam telah menunjukkan keselarasan terhadap pemenuhan Indikator Strategi Kewilayahan- Ketahanan Pangan (Perikanan) yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF 2026. Pemerintah Kota Batam agar dapat melanjutkan langkah penguatan program dan pendanaan guna menjaga keberlanjutan ketahanan pangan berbasis sektor perikanan.

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Ketahanan Pangan (Pertanian)	• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian; • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya; • Penguatan kerja sama antar daerah	none	1. Dalam rangka penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian, Pemerintah Kota Batam telah melakukan antara lain: 1) Pemberian subsidi bunga pinjaman 0% kepada usaha mikro yang ber-KTP Batam 2)Pemberian perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi petani (Halaman 41) 3) Pendampingan kepada pelaku usaha perikanan dan pertanian (halaman 41) 2. Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya, Pemerintah Kota Batam telah mengeluarkan kebijakan pembebasan PBB-P2 bagi NJOP di bawah 120 Juta 3. Terkait dengan penguatan kerja sama antar daerah, pemerintah Kota Batam akan menjalin kerja sama antar daerah dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok; dan (Halaman 41)	Selaras	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, Rancangan KUA Tahun Anggaran 2026 Kota Batam telah menunjukkan keselarasan terhadap pemenuhan Indikator Strategi Kewilayahan- Ketahanan Pangan (Pertanian) yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF 2026. Pemerintah Kota Batam agar dapat mempertahankan keselarasan tersebut melalui penguatan kebijakan dan pengalokasian anggaran yang mendukung peningkatan kapasitas sektor pertanian dan stabilitas ketahanan pangan daerah.

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	• Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; • Dukungan APBD untuk meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar; • Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	none	1. Dalam rangka , Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan, Pemerintah Kota Batam telah melakukan kebijakan antara lain : 1) Pemberian subsidi bunga pinjaman 0% kepada usaha mikro yang ber-KTP Batam (Halaman 41) 2) Pemberian subsidi sembako dalam rangka pengendalian inflasi Kota Batam (Halaman 41) 3. Dukungan APBD untuk meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran, telah dituangkan kebijakan berupa Pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja (Halaman 39) 4. Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin, Pemerintah Kota Batam telah menungkan kebijakan untuk terus melakukan Pemenuhan target Universal Health Coverage; (Halaman 41)	Selaras	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, Rancangan KUA Tahun Anggaran 2026 Kota Batam telah menunjukkan keselarasan terhadap pemenuhan Indikator Strategi Kewilayahan- Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan) yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF 2026. Pemerintah Kota Batam agar dapat mempertahankan keselarasan tersebut melalui optimalisasi kebijakan dan penganggaran yang mendukung penurunan tingkat kemiskinan secara terukur dan berkelanjutan.

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	• Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan; • Penguatan DAU earmarked dan evaluasi mandatory spending sektor pendidikan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; • Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	none	Terkait dengan Pendidikan, Pemerintah Kota Batam terus berkomitmen melakukan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing melalui: - Pemberian beasiswa/bantuan kepada siswa tidak mampu di SD dan SMP swasta yang diatur dengan Peraturan Wali Kota; (Halaman 39) - Pemberian seragam sekolah untuk siswa baru SD dan SMP negeri dan swasta; (Halaman 39) - Pemberian beasiswa bagi mahasiswa undangan pada 7 Perguruan Tinggi Negeri, beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang tidak mampu di Perguruan Tinggi Negeri, dan beasiswa bagi mahasiswa hinterland yang berprestasi di Perguruan Tinggi Negeri dengan jurusan tertentu; (Halaman 39) - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan ruang kelas baru dan pengadaan mebel; (Halaman 39) - Pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. (Halaman 39) - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan melalui antara lain pembangunan ruang kelas baru dan pengadaan mebel, pengadaan peralatan Pendidikan (Halaman 39) - Pemenuhan mandatory spending bidang pendidikan (Halaman 39)	Selaras	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, Rancangan KUA Tahun Anggaran 2026 Kota Batam telah menunjukkan keselarasan terhadap pemenuhan Indikator Strategi Kewilayahan-Pendidikan yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF 2026. Pemerintah Kota Batam agar mempertahankan keselarasan tersebut melalui optimalisasi kebijakan dan penganggaran dalam rangka mendukung peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan di wilayah Kota Batam.

Lampiran 3

Program Prioritas dan Kebijakan Fiskal Nasional

Indeks 1: Referensi

Klasifikasi	Jumlah Subkegiatan di Referensi	Jumlah Subkegiatan di PPAS	Skor
Belum ada data.			

Indeks 2: Unit Cost

	Anggaran	Penduduk	Unit Cost
Belum ada data.			

Indeks 3: Budget Optimizer

Klasifikasi	Nilai	Total Belanja	Persentase	Target Budget Optimizer	Skor
Belum ada data.					

Evaluasi

Skor Indeks	Keterangan
Belum ada data.	

Lampiran 4

Mandatory Spending

Jenis	Nilai KUA/PPAS	Total Belanja	Persentase	Batasan	Status	Catatan
Belum ada data.						

PDRD

Jenis	Nilai KUA/PPAS	Total Pendapatan	Nilai Minimal	Persentase	Batasan	Status	Catatan
Belum ada data.							

Hasil Evaluasi Penyelarasan KEM-PPKF dan KUA-PPAS 2026

Kode Satker : 990523

Nama Pemda : Kota Batam

Verifikator : Provinsi Kepulauan Riau

A. Target Makro

Uraian	Target	Nilai KUA	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi	7,37-8,01	6,7-7,5	Pemerintah Kota Batam dalam Rancangan KUA PPAS TA.2026 menetapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7-7,5%. Target yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Batam berbeda dengan target pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dan Rancangan Akhir RKPD TA. 2026 yaitu 7,37-8,01%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan belum sepenuhnya mencerminkan keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah Kota Batam perlu melakukan optimalisasi program dan kegiatan strategis yang mendorong peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah, serta memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan utama, agar capaian pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat dan selaras dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.
Tingkat Kemiskinan	4,62-4,52	4,41-4,55	Pemerintah Kota Batam dalam Rancangan Akhir RKPD TA. 2026 dan Rancangan KUA PPAS TA.2026 menetapkan tingkat kemiskinan sebesar 4,55-4,41%. Target ini berada pada kisaran atas rentang target Tingkat Kemiskinan Kota Batam yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 yaitu 4,62-4,52%, sehingga secara umum telah selaras dengan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah Kota Batam agar mengakselerasi program penanggulangan kemiskinan secara terarah dan terukur dengan harapan dapat memperkuat kontribusi Kota Batam dalam pencapaian target penurunan tingkat kemiskinan melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029.

B. Penyelarasaan Narasi KUA

Uraian	Status	Keterangan
Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Selaras	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, Rancangan KUA Tahun Anggaran 2026 Kota Batam telah menunjukkan keselarasan terhadap pemenuhan Indikator Strategi Kewilayahan- Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi) yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF 2026. Untuk mendukung pencapaian program yang telah direncanakan, Pemerintah Kota Batam perlu mengalokasikan anggarannya dalam APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026.
Kesehatan (Indeks Kesehatan)	Selaras	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, Rancangan KUA Tahun Anggaran 2026 Kota Batam telah menunjukkan keselarasan terhadap pemenuhan Indikator Strategi Kewilayahan- Kesehatan (Indeks Kesehatan) yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF 2026. Untuk itu, Pemerintah Kota Batam agar mempertahankan konsistensi tersebut serta memastikan dukungan pendanaan dalam APBD tetap diarahkan untuk meningkatkan capaian Indeks Kesehatan secara berkelanjutan.
Ketahanan Pangan (Perikanan)	Selaras	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, Rancangan KUA Tahun Anggaran 2026 Kota Batam telah menunjukkan keselarasan terhadap pemenuhan Indikator Strategi Kewilayahan- Ketahanan Pangan (Perikanan) yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF 2026. Pemerintah Kota Batam agar dapat melanjutkan langkah penguatan program dan pendanaan guna menjaga keberlanjutan ketahanan pangan berbasis sektor perikanan.
Ketahanan Pangan (Pertanian)	Selaras	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, Rancangan KUA Tahun Anggaran 2026 Kota Batam telah menunjukkan keselarasan terhadap pemenuhan Indikator Strategi Kewilayahan- Ketahanan Pangan (Pertanian) yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF 2026. Pemerintah Kota Batam agar dapat mempertahankan keselarasan tersebut melalui penguatan kebijakan dan pengalokasian anggaran yang mendukung peningkatan kapasitas sektor pertanian dan stabilitas ketahanan pangan daerah.
Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Selaras	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, Rancangan KUA Tahun Anggaran 2026 Kota Batam telah menunjukkan keselarasan terhadap pemenuhan Indikator Strategi Kewilayahan- Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan) yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF 2026. Pemerintah Kota Batam agar dapat mempertahankan keselarasan tersebut melalui optimalisasi kebijakan dan penganggaran yang mendukung penurunan tingkat kemiskinan secara terukur dan berkelanjutan.

Uraian	Status	Keterangan
Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Selaras	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, Rancangan KUA Tahun Anggaran 2026 Kota Batam telah menunjukkan keselarasan terhadap pemenuhan Indikator Strategi Kewilayahan- Pendidikan yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF 2026. Pemerintah Kota Batam agar mempertahankan keselarasan tersebut melalui optimalisasi kebijakan dan penganggaran dalam rangka mendukung peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan di wilayah Kota Batam.

C. Program Prioritas dan Kebijakan Fiskal Nasional

Uraian	Nilai	Keterangan
Belum ada data.		

D. Mandatory Spending

Uraian	Status	Keterangan
Mandatory Spending		
PDRD		

Lampiran 2

Penyelarasaan Narasi KUA

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasaan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	• Penguatan tata kelola investasi seperti deregulasi perizinan, penyederhanaan birokrasi dan peningkatan transparansi pelaksanaan proyek; • Alokasi belanja ekonomi yang mendukung Pengembangan koridor industri semikonduktor, mesin dan perlengkapan, dirgantara, industri transportasi laut dan galangan kapal, hilirisasi bauksit, logam, besi, dan baja, industri berteknologi tinggi, industri hijau, dan industri halal; • Pembangunan infrastruktur konektivitas dalam hal transportasi darat dan perikanan sesuai dengan RPJMN; • Meningkatkan persentase pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.; • Pemberian insentif fiskal PDRD secara selektif untuk sektor unggulan daerah.	none	1. Dalam Penguatan tata kelola investasi seperti deregulasi perizinan, penyederhanaan birokrasi dan peningkatan transparansi pelaksanaan proyek, Pemerintah Kota Batam berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur perizinan, kepastian hukum, perlindungan investasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima (halaman 36), menyusun peta potensi investasi di Kota Batam dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan investasi, menjaga kondusivitas daerah untuk peningkatan investasi 2. Dalam rangka alokasi belanja ekonomi yang mendukung Pengembangan koridor industri semikonduktor, mesin dan perlengkapan, dirgantara, industri transportasi laut dan galangan kapal, hilirisasi bauksit, logam, besi, dan baja, industri berteknologi tinggi, industri hijau, industri halal, dan Pembangunan infrastruktur konektivitas, Pemerintah Kota Batam telah menuangkannya dalam kebijakan belanja antara lain: 1). Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan, melalui: - Pengadaan alat berat, pembangunan rumah pompa di Kecamatan Sungai Beduk, pembangunan drainase di Taman Raya, Simpang Kepri Mall, Duta Plamo, Legenda Malaka, Taman Makam Pahlawan, Perumahan Marina Green, Jalan S.Parman, Baloi Permai dan Puriloka untuk penanganan banjir; - Pengadaan excavator, compactor, armroll truck, dump	Selaras	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, Rancangan KUA Tahun Anggaran 2026 Kota Batam telah menunjukkan keselarasan terhadap pemenuhan Indikator Strategi Kewilayahan- Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi) yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF 2026. Untuk mendukung pencapaian program yang telah direncanakan, Pemerintah Kota Batam perlu mengalokasikan anggarannya dalam APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026.

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
			truck dan bin container untuk penanganan sampah; - Peningkatan pelayanan air bersih hinterland di Pulau Mubut dan Teluk Nipah Kelurahan Galang Baru Kecamatan Galang; - Pembangunan jalan Simpang Princess Tiban ke Kantor Lurah Kibing, jalan akses Tanjung Uma/DC Mall, simpang SMPN 25 Tiban ke Tanjung Uma; - Pembangunan jembatan Bengkong Sadai dan Belian; - Peningkatan jalan di sejumlah titik Kota Batam antara lain Belian-Batam Centre, Cikitsu-SMAN 3, Golden Prawn-Ocarina, Simpang KDA-Simpang BI, Sei Pancur-Kampung Bagan-DAM, Simpang Kara-Orchid Park, Simpang Sekolah Ulil Albab-Tiban 3, Simpang Mukakuning-Tanjung Piayu, Simpang Frangky-Rosedale-Underpass Pelita, Kantor Camat Sagulung-Simpang NATO, Legenda Malaka depan SMPN 12 sampai Simpang Helm; - Pembangunan lampu penerangan jalan umum di Southlink, Marina City, UIB sampai Flyover Laluan Madani; - Pengecatan kanstin di jalan utama dari Simpang Bandara sampai Simpang Flyover Laluan Madani; - Pemasangan traffic light di Simpang Masjid Agung Batam Centre; - Pradesign penataan taman di Kecamatan Sekupang dan Sagulung; dan - Pengadaan mobil tangga pemadam aerial panjang 46 meter.		

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
			2). Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah, melalui: - Peningkatan infrastruktur daerah untuk menarik investasi dan mendukung sektor pariwisata. 3. Untuk pemenuhan earmarking PKB dan Opsen PKB, Pemerintah Kota Batam telah menuangkannya dalam kebijakan belanja melalui antara lain: - pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda transportasi 3. Dalam hal pemberian insentif fiskal PDRD secara selektif untuk sektor unggulan daerah, Pemerintah Kota Batam telah melakukan kebijakan Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah secara transparan dan akuntabel antara lain melalui: 1) digitalisasi layanan pajak dan retribusi, penggunaan tapping box 2) pelayanan mobil pajak keliling 3) meningkatkan pengawasan terhadap potensi penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah 4) memberikan pengurangan PBB-P2 5) membebaskan PBB-P2 bagi NJOP dibawah 120 juta 6) pemberbasan BPHTPB bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (Halaman 39-42)		

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Kesehatan (Indeks Kesehatan)	• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan imunisasi dasar lengkap, persalinan serta penguatan layanan kesehatan; • Meningkatkan persentase earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; • Melakukan skema Sinergi Pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infra layanan kesehatan.	none	Dalam hal Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, Meningkatkan persentase earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan, Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan dan Melakukan skema Sinergi Pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infra layanan kesehatan, Pemerintah Kota Batam telah melakukan Kebijakan dalam rangka Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi melalui antara lain : - Pemenuhan target Universal Health Coverage; - Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; (Halaman 41)	Selaras	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, Rancangan KUA Tahun Anggaran 2026 Kota Batam telah menunjukkan keselarasan terhadap pemenuhan Indikator Strategi Kewilayahan- Kesehatan (Indeks Kesehatan) yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF 2026. Untuk itu, Pemerintah Kota Batam agar mempertahankan konsistensi tersebut serta memastikan dukungan pendanaan dalam APBD tetap diarahkan untuk meningkatkan capaian Indeks Kesehatan secara berkelanjutan.

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Ketahanan Pangan (Perikanan)	• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan;	none	1. Untuk mendukung penguatan fiskal daerah, Pemerintah Kota Batam telah melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah secara transparan dan akuntabel melalui digitalisasi layanan pajak dan retribusi, penggunaan tapping box, pelayanan mobil pajak keliling dan meningkatkan pengawasan terhadap potensi penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah; (halaman 36) 2. Untuk Penguatan kerja sama antar daerah, dilakukan hal-hal antara lain : 1) peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi untuk peningkatan Dana Transfer dan Pendapatan Bagi Hasil melalui penyiapan data pendukung dalam mengalokasikan dana transfer pusat dan bagi hasil provinsi; (halaman 36) 2) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk peningkatan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah; (halaman 36) 3)Menjalin kerja sama antar daerah dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok; dan (Halama 41) 3. Dalam rangka penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan, Pemerintah Kota Batam melakukan kebijakan berupa: 1) Pemberian perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan kepada pengemudi transportasi online, nelayan, petani, pengemudi boat pancung dan para penerima insentif 2) Pendampingan kepada pelaku usaha perikanan dan pertanian (Halaman 41)	Selaras	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, Rancangan KUA Tahun Anggaran 2026 Kota Batam telah menunjukkan keselarasan terhadap pemenuhan Indikator Strategi Kewilayahan- Ketahanan Pangan (Perikanan) yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF 2026. Pemerintah Kota Batam agar dapat melanjutkan langkah penguatan program dan pendanaan guna menjaga keberlanjutan ketahanan pangan berbasis sektor perikanan.

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Ketahanan Pangan (Pertanian)	• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian; • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya; • Penguatan kerja sama antar daerah	none	1. Dalam rangka penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian, Pemerintah Kota Batam telah melakukan antara lain: 1) Pemberian subsidi bunga pinjaman 0% kepada usaha mikro yang ber-KTP Batam 2)Pemberian perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi petani (Halaman 41) 3) Pendampingan kepada pelaku usaha perikanan dan pertanian (halaman 41) 2. Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya, Pemerintah Kota Batam telah mengeluarkan kebijakan pembebasan PBB-P2 bagi NJOP di bawah 120 Juta 3. Terkait dengan penguatan kerja sama antar daerah, pemerintah Kota Batam akan menjalin kerja sama antar daerah dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok; dan (Halaman 41)	Selaras	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, Rancangan KUA Tahun Anggaran 2026 Kota Batam telah menunjukkan keselarasan terhadap pemenuhan Indikator Strategi Kewilayahan- Ketahanan Pangan (Pertanian) yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF 2026. Pemerintah Kota Batam agar dapat mempertahankan keselarasan tersebut melalui penguatan kebijakan dan pengalokasian anggaran yang mendukung peningkatan kapasitas sektor pertanian dan stabilitas ketahanan pangan daerah.

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	• Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; • Dukungan APBD untuk meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar; • Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	none	1. Dalam rangka , Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan, Pemerintah Kota Batam telah melakukan kebijakan antara lain : 1) Pemberian subsidi bunga pinjaman 0% kepada usaha mikro yang ber-KTP Batam (Halaman 41) 2) Pemberian subsidi sembako dalam rangka pengendalian inflasi Kota Batam (Halaman 41) 3. Dukungan APBD untuk meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran, telah dituangkan kebijakan berupa Pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja (Halaman 39) 4. Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin, Pemerintah Kota Batam telah menungkan kebijakan untuk terus melakukan Pemenuhan target Universal Health Coverage; (Halaman 41)	Selaras	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, Rancangan KUA Tahun Anggaran 2026 Kota Batam telah menunjukkan keselarasan terhadap pemenuhan Indikator Strategi Kewilayahan- Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan) yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF 2026. Pemerintah Kota Batam agar dapat mempertahankan keselarasan tersebut melalui optimalisasi kebijakan dan penganggaran yang mendukung penurunan tingkat kemiskinan secara terukur dan berkelanjutan.

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	• Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan; • Penguatan DAU earmarked dan evaluasi mandatory spending sektor pendidikan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; • Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	none	Terkait dengan Pendidikan, Pemerintah Kota Batam terus berkomitmen melakukan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing melalui: - Pemberian beasiswa/bantuan kepada siswa tidak mampu di SD dan SMP swasta yang diatur dengan Peraturan Wali Kota; (Halaman 39) - Pemberian seragam sekolah untuk siswa baru SD dan SMP negeri dan swasta; (Halaman 39) - Pemberian beasiswa bagi mahasiswa undangan pada 7 Perguruan Tinggi Negeri, beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang tidak mampu di Perguruan Tinggi Negeri, dan beasiswa bagi mahasiswa hinterland yang berprestasi di Perguruan Tinggi Negeri dengan jurusan tertentu; (Halaman 39) - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan ruang kelas baru dan pengadaan mebel; (Halaman 39) - Pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. (Halaman 39) - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan melalui antara lain pembangunan ruang kelas baru dan pengadaan mebel, pengadaan peralatan Pendidikan (Halaman 39) - Pemenuhan mandatory spending bidang pendidikan (Halaman 39)	Selaras	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, Rancangan KUA Tahun Anggaran 2026 Kota Batam telah menunjukkan keselarasan terhadap pemenuhan Indikator Strategi Kewilayahan-Pendidikan yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF 2026. Pemerintah Kota Batam agar mempertahankan keselarasan tersebut melalui optimalisasi kebijakan dan penganggaran dalam rangka mendukung peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan di wilayah Kota Batam.

Lampiran 3

Program Prioritas dan Kebijakan Fiskal Nasional

Indeks 1: Referensi

Klasifikasi	Jumlah Subkegiatan di Referensi	Jumlah Subkegiatan di PPAS	Skor
Belum ada data.			

Indeks 2: Unit Cost

	Anggaran	Penduduk	Unit Cost
Belum ada data.			

Indeks 3: Budget Optimizer

Klasifikasi	Nilai	Total Belanja	Persentase	Target Budget Optimizer	Skor
Belum ada data.					

Evaluasi

Skor Indeks	Keterangan
Belum ada data.	

Lampiran 4

Mandatory Spending

Jenis	Nilai KUA/PPAS	Total Belanja	Persentase	Batasan	Status	Catatan
Belum ada data.						

PDRD

Jenis	Nilai KUA/PPAS	Total Pendapatan	Nilai Minimal	Persentase	Batasan	Status	Catatan
Belum ada data.							